

PENINGKATAN DAYA SAING DAN KOMPETENSI LULUSAN POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE MELALUI PROGRAM REVITALIASI

Rizal Syahyadi

*Staf Pengajar Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Lhokseumawe,
Jl Banda Aceh-Medan Km 280 Buketrata- Lhokseumawe
syahyadi78@gmail.com*

Abstrak— Produktivitas tenaga kerja memegang peranan penting dalam dinamika ekonomi dan industri dewasa ini. Produktivitas tenaga kerja sendiri lahir dari kompetensi yang dimilikinya. Oleh karenanya, melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 09 Tahun 2016 sedang gencar melakukan revitalisasi pendidikan vokasi guna meningkatkan produktivitas dan daya saing bangsa. Namun ditengah-tengah upaya revitalisasi tersebut, masih banyak masyarakat yang belum mengerti pendidikan vokasi dan arti pentingnya dalam menumbuhkembangkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia. Pendidikan vokasi telah lama ada di Indonesiasalahsatunya seperti politeknik yang merupakan pendidikan tinggi yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan. Secara khusus, program pendidikan vokasi diarahkan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja tertentu sehingga dapat langsung diserap sebagai tenaga kerja di industri/swasta, lembaga pemerintah atau berwiraswasta secara mandiri. Pendidikan vokasi akan dapat berjalan optimal jika stakeholder (masyarakat, pemerintah, industri/dunia usaha) bersinergi dalam mewujudkan pendidikan yang menyiapkan tenaga kerja siap pakai.

Kata kunci: pendidikan vokasi, pasar kerja, link and match.

PENDAHULUAN

Pada era persaingan saat ini, kompetensi tenaga kerja dan sertifikasi profesi merupakan solusi sebagai upaya meningkatkan produktivitas tenaga kerja. Selanjutnya, produktivitas tenaga kerja merupakan variabel kunci untuk memenangkan persaingan antar individu, antar industri, antar sektor, antar daerah, dan antar negara. Namun ketersediaan tenaga kerja yang siap untuk kebutuhan pasar kerja saat ini menjadi tantangan tersendiri dari pemerintah dalam membangun sistem pendidikan yang tepat. Saat ini terjadi kesenjangan yang nyata, jika hasil pendidikan tinggi tidak optimal diserap oleh pasar kerja. Keadaan ini dapat terjadi akibat dari salah satu penyebabnya adalah proses pendidikan tinggi masih kurang siap menghadapi kebutuhan pasar kerja yang bergerak dengan cepat dengan tuntutan mutu dan kompetensi yang sesuai dengan dinamika pertumbuhan objek pekerjaan.

Undang Undang Pendidikan Tinggi No.12 tahun 2012 [1] terlihat adanya langkah yang lebih konkrit dan strategis dalam menghadapi permasalahan dunia pendidikan yang berorientasi pada penyediaan tenaga terdidik yang terlatih dan terampil melalui jalur pendidikan vokasi untuk menjadikan lulusan menjadi tenaga praktisi, agarmampu memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang ditujukan untuk menghasilkan tenaga praktisi sampai pada tahap tingkatan yang tertinggi yaitu tenaga ahli yang memiliki kemampuan untuk dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam menemukan/menciptakan sesuatu untuk kebutuhan dan kemaslahatan umat manusia.

Seiring dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia 25 tahun ke depan, Indonesia diperkirakan menjadi negara 10 besar kekuatan ekonomi dunia, jika stabilitas pertumbuhan ekonomi dapat terjaga dengan baik. Selaras dengan visi pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025, maka visi Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju, Adil, dan Makmur” (Republik Indonesia, 2011) [2]. Perkiraan ini pun membuat pemerintah dan masyarakat luas menyadari kebutuhan terhadap lulusan vokasional yang semakin meningkat. Posisi Indonesia hingga 2050 diperkirakan akan terus meningkat dan mampu bersanding dengan negara ekonomi besar, seperti Amerika Serikat, China, India, dan Brasil.

Indonesia saat ini masih menjadi salah satu produsen besar di dunia untuk berbagai komoditas, antara lain di bidang pertanian (kelapa sawit, kakao, karet), di bidang pertambangan (timah, bauksit, nikel), cadangan energi (batu bara, panas bumi dan gas alam) serta sumberdaya di bidang kelautan. Dalam 10 tahun ke depan, Indonesia diprediksi menjadi salah satu motor penggerak pertumbuhan ekonomi dunia. Maka, pengembangan industri di Indonesia diperkirakan meningkat tajam sehingga sangat dibutuhkan tenaga-tenaga terampil untuk mengisi kebutuhan industri dalam berbagai bidang.

Kebutuhan tenaga terampil yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi, dapat terjadi jika pemerintah memiliki program yang jelas dan fokus pada penyiapan tenaga terdidik dan terlatih yang memiliki mutu dan kompetensi keahlian sesuai

dengan kebutuhan pasar kerja. Keterampilan, kreatifitas dan bakat menjadi sangat penting sebagai sumberdaya dari kekuatan rakyat dalam membangun negara [3].

Menurut Asian Development Bank, 2004, negara-negara berkembang tidak akan dapat menggerakkan pertumbuhan dasar ekonominya jika tidak tersedianya jumlah tenaga kerja yang terampil dalam jumlah yang banyak. Pertumbuhan ekonomi akan bergerak seiring dengan kebutuhan tenaga kerja yang terampil. Wan [4] memberikan contoh dalam masa transisional Malaysia menuju Vision 2020, dimana terjadinya masa transformasi pertumbuhan ekonomi Malaysia yang menuntut adanya kebutuhan tenaga kerja terampil (Skilled Workers) dalam berbagai tingkatan (semi skilled, skilled and highly skilled or multi skilled worker) to support the industrializing economy. Daerah yang memiliki sumber daya manusia yang cukup baik, akan mendapatkan peluang lebih cepat dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Penguatan sumber daya manusia melalui jalur pendidikan vokasi merupakan pilihan yang cukup baik untuk di terapkan, dalam usaha untuk mendapatkan tenaga terampil dan ahli dalam berbagai bidang keahlian yang dapat di serap oleh pasar kerja.

Kenyataan yang terlihat saat ini, adanya kebutuhan nyata terhadap tenaga kerja terampil dan terlatih dari kalangan investor lokal, maupun investor asing dalam menggerakkan investasinya dalam bidang industri di berbagai bidang usaha. Keadaan ini harus dapat di antisipasi dengan cerdas oleh pemerintah serta pengelola pendidikan, sehingga di harapkan setiap lembaga pendidikan dapat menghasilkan tenaga terdidik yang terserap oleh pasar kerja. Perlu adanya kebijakan yang strategis dalam mempersiapkan SDM untuk kebutuhan saat ini dan masa depan. Kebutuhan tenaga terdidik dalam jalur pendidikan vokasi adalah kebutuhan nyata saat ini, akan sangat berbeda halnya jika penguatan dan pengembangan SDM saat ini di arahkan pada bidang penguasaan pengembangan sumberdaya manusia dalam jalur riset and development (R&D) utk penguasaan sains dan teknologi canggih. Kenyataan yang terlihat saat ini adalah kebutuhannya masih sangat terbatas. Walaupun demikian penguasaan dalam bidang tersebut tetap harus terus di upayakan, dengan tetap menempatkan prioritas kebutuhan yang nyata pada pengguna dari hasil pendidikan saat ini, karena ini berkaitan langsung dengan masalah tidak terserapnya tenaga terdidik dalam pasar kerja, karena pendidikan yang di siapkan tidak menunjang kebutuhan pasar kerja.

PENDIDIKAN VOKASI

Pendidikan vokasi merupakan program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi yang bertujuan untuk mempersiapkan tenaga yang dapat menetapkan keahlian dan ketrampilan di bidangnya, siap kerja dan mampu bersaing secara global.

Munir [6], Pendidikan vokasi menganut sistem terbuka (*multi-entry-exit system*) dan multi makna yang berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, pembentukan watak, dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup *life skill*. Pendidikan vokasi berorientasi pada kecakapan kerja sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terapan serta sesuai dengan tuntutan kebutuhan lapangan kerja.

Pendidikan vokasi merupakan pendidikan keahlian terapan yang diselenggarakan di perguruan tinggi berbentuk universitas, institut, sekolah tinggi, politeknik, akademi dan akademi komunitas. Jenjang pendidikan vokasi sesuai dengan Undang Undang Pendidikan Tinggi No.12 tahun 2012 menempatkan jenjang pendidikan di mulai dari D-I, D-II, D-III, Sarjana Terapan, Magister Terapan dan Doktor Terapan. Standar nasional pendidikan vokasi dikembangkan berdasarkan standar kompetensi nasional dan/atau internasional. Pengajaran pada program pendidikan vokasi lebih mengutamakan keterampilan dibandingkan dengan kuliah teori. Menyelenggarakan pendidikan vokasional dengan penekanan pada keahlian (skilled) dan praktek selaras dengan kebutuhan dunia kerja dan industri untuk menghasilkan tenaga ahli profesional yang berstandar internasional. Mengembangkan bidang-bidang vokasional dalam upaya untuk meningkatkan taraf kehidupan dan kualitas masyarakat Indonesia. Mengembangkan kerjasama antar lembaga/instansi di dalam maupun di luar negeri untuk kepentingan pendidikan, praktek kerja dan adaptasi kurikulum.

Kurikulum untuk pendidikan vokasi harus selalu mengikuti kompetensi keahlian yang di perlukan oleh pasar kerja, materi pendidikan terus menerus dikembangkan sesuai dengan KBK (kurikulum berbasis kompetensi) dan dievaluasi secara periodik. Pengembangan kurikulum ini dilakukan dengan supervisi penuh dari bidang akademik yang berkompeten serta selalu mendapatkan masukan-masukan dari stakeholder (pemerintah, dunia usaha/industri, praktisi pendidikan, pemakai lulusan, alumni, dll). KBK program studi juga dikembangkan berdasarkan pada perkembangan ilmu dan teknologi serta trend pendidikan vokasi di dunia, demikian pula halnya dalam penguatan proses pembelajaran diperlukan terus menerus usaha ke arah perubahan yang dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan seperti halnya penerapan proses pembelajaran melalui Problem Base Learning (PBL), dll.

Serupa dengan kurikulum, program studi baru terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi baik pada level nasional maupun internasional. Pendidikan vokasi bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang memiliki ketrampilan dan keahlian terapan tertentu di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta menghasilkan penelitian terapan dan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat. Jenis pendidikan yang diselenggarakan melalui pendidikan vokasi seperti pada jenjang Diploma III dan Sarjana Terapan sebagai contoh, memiliki kompetensi sebagai berikut.

Program Diploma III diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya. Program Sarjana Terapan diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan,

memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki ketrampilan manajerial, serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan dan teknologi di dalam bidang keahliannya.

REVITALISASI PENDIDIKAN TINGGI VOKASI

Upaya revitalisasi pendidikan tinggi vokasi terus dilakukan pemerintah. Hal tersebut dalam rangka meningkatkan daya serap dan tenaga kerja erampil dari para lulusan sekolah tinggi atau politeknik di dunia kerja (industri). Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti), Mohamad Nasir, mengatakan semua lulusan politeknik nantinya akan dapat pekerjaan sesuai kompetensinya dan para industry akan dapat pasokan tenaga kerja kompeten. Ini perlu dilakukan revitalisasi pendidikan vokasi tingkat perguruan tinggi akan dilakukan pada 2017 untuk menjawab tantangan terkait kebutuhan sumber daya manusia siap kerja.

Program revitalisasi ini sudah dimulai awal 2017 dan dirancang agar semua lulusan pendidikan tinggi vokasi atau politeknik memiliki sertifikat kompetensi sehingga industry mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya. Setiap lulusan politeknik sangat membutuhkan sertifikat kompetensi, guna menunjang keahliannya. Sertifikat ini dikeluarkan oleh lembaga independen dan sebagainya akan ditanggung pemerintah. Dalam program revitalisasi ini juga akan dilakukan pembaharuan kurikulum, yaitu penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri. Sehingga lulusan memiliki keahlian sebagaimana kebutuhan industri. Program ini juga akan melakukan pemenuhan dosen dari industri, penerapan dual system dengan membangun teaching factory. Revitalisasi ini juga akan melakukan retraining/retooling untuk dosen politeknik yang sudah ada untuk meningkatkan keahliannya.

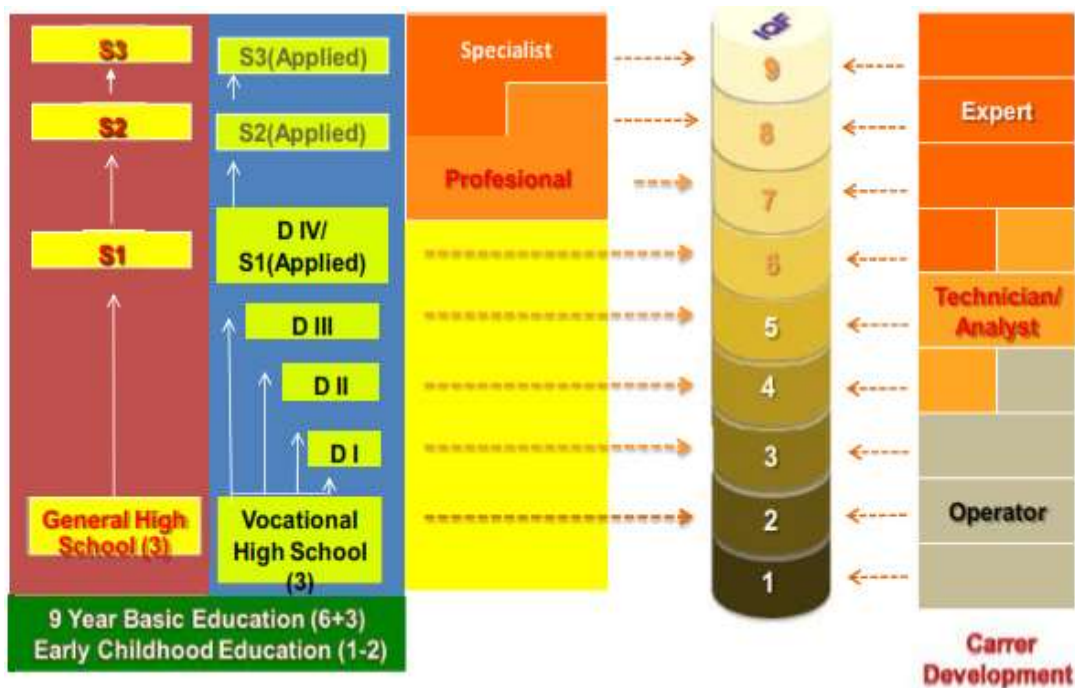
Direktorat Jendral Kelembagaan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Kemenristek dikti Patdonu Suwignjo mengatakan, revitalisasi pendidikan tinggi vokasi bias terlihat dari apa yang dibutuhkan oleh dunia industry dan kebutuhan itu sudah disiapkan oleh dunia pendidikan. Saat ini perusahaan tidak hanya melihat para pencari kerja hanya dari selebar ijazah, tapi keterampilan dan keahlian juga sangat diperhatikan.

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA (KKNI)

Keberadaan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan UU Perguruan Tinggi (PT) kian memberikan angin segar bagi pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Hadirnya KKNI membuat pendidikan vokasi semakin diakui dan sejajar dengan pendidikan akademik serta profesi. Ini momentum nasional bagi pengembangan pendidikan vokasi di Indonesia. Pada pasal 29 UU Perguruan Tinggi disebutkan bahwa, KKNI atau IQF (Indonesia Qualification Framework) merupakan penjangjangan capaian pembelajaran yang menyetarakan luaran bidang pendidikan formal, non formal, informal atau pengalaman kerja dalam rangka pengakuan kompetensi kerja sesuai struktur pekerjaan di berbagai sektor. KKNI dapat menjadi acuan pokok dalam penetapan kompetensi lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi.

Berdasarkan perpres Nomor 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), pasal 2 disebutkan bahwa KKNI terdiri atas 9 (sembilan) jenjang kualifikasi, dimulai dari jenjang 1 (satu) sebagai jenjang terendah sampai dengan jenjang 9 (sembilan) sebagai jenjang tertinggi. Pada pasal 5 (lima) Perpres ini disebutkan bahwa lulusan Diploma III paling rendah setara dengan jenjang 5, dan lulusan Diploma IV atau Sarjana Terapan dan Sarjana paling rendah setara dengan jenjang 6. Dengan adanya UU PT, pendidikan vokasi atau politeknik di Indonesia diberi peluang untuk membuka layanan pendidikan pada jenjang master dan doktor terapan. Selama ini, politeknik menawarkan pendidikan vokasi hingga jenjang diploma empat (D.IV) atau Sarjana Terapan yang sama dengan S-1 pendidikan tinggi akademik. Melalui UU PT, saat ini bisa menjadi payung hukum pengembangan pendidikan vokasi ke depannya.

Sementara itu, KKNI diharapkan dapat menjadi jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, nonformal, informal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Kompetensi lulusan pendidikan vokasi sangat dibutuhkan. Sayangnya, hal tersebut belum digarap secara serius. Di sisi lain, saat ini jumlah lulusan pendidikan vokasi yang berkualitas di Indonesia belum sebanding dengan kebutuhan tenaga kerja pada dunia industri.



Gambar 1. Benchmarking KKKNI: Sumber Dirjen Dikti Depdikbud

Pengakuan terhadap lulusan pendidikan kejuruan, juga perlu didorong kepada perusahaan bahkan pemerintah ketika berlangsung proses rekrutmen tenaga kerja/PNS. Saat ini proses rekrutmen tenaga kerja masih banyak berdasarkan ijazah yang dimiliki dan bukan kompetensi. Harusnya kompetensi bukan semata-mata ijazah. Ini yang harus diubah karena kita bukan pemasok tenaga kerja tapi pengguna tenaga kerja. Arah pendidikan di Indonesia kurang relevan dengan kebutuhan pasar. Hal ini terjadi karena prioritas pendidikan di Indonesia lebih mengarah kepada pendidikan akademis dari pada pendidikan vokasional yang menghasilkan tenaga kerja terampil. Kondisi ini berbeda dengan negara maju seperti Australia, Taiwan, Korea Selatan, Singapore dan Jepang. Di beberapa negara itu pendidikan vokasional jauh lebih banyak dibandingkan dengan pendidikan akademik. Dampak sebagian besar perguruan tinggi (PT) di Indonesia lebih banyak menekankan pada pendidikan akademik dibandingkan pendidikan vokasional mengakibatkan banyak lulusan PT tidak menguasai aspek keahlian yang diharapkan oleh lapangan kerja. Selain itu program keahlian selalu dianggap program kelas dua dan sub-ordinasi dari program akademik, sehingga kualitas peserta didik seringkali tidak memenuhi persyaratan minimal yang diperlukan bagi pendidikan keahliannya. Maka perlu rekonstruksi terhadap dunia pendidikan kita agar misi untuk mencetak manusia Indonesia yang cerdas dan kompetitif di era global bisa dicapai. Adanya Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai jembatan antara sektor pendidikan dan pelatihan untuk membentuk SDM nasional berkualitas dan bersertifikat melalui skema pendidikan formal, non formal, in formal, pelatihan kerja atau pengalaman kerja. Dengan KKNI ini ada pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.

HUBUNGAN INDUSTRI DAN PENDIDIKAN VOKASI

Perkembangan dunia industri membuat kebutuhan tenaga kerja yang ber-qualified sesuai dengan profesi dan keterampilan terkait sangat tinggi. Posisi untuk tenaga kerja profesional itu biasanya diisi oleh orang yang memiliki sertifikasi atau tergolong profesional. Para profesional itu kerap lahir dari jenjang pendidikan nonsarjana alias diploma yang dikemas dalam bentuk pendidikan vokasi. Dalam jenjang pendidikan ini, mahasiswa ditempa dengan banyak praktik atas ilmu yang ditimba sehingga asupan pengajaran praktik lebih banyak dibandingkan dengan teori.

Secara garis besar industrialisasi adalah upaya untuk mentransformasikan unit-unit usaha kecil menjadi unit usaha menengah, dan meningkatkan unit usaha menengah menjadi unit usaha besar. Dalam mentransformasikan industri atau pembangunan tersebut amat diperlukan SDM bermutu tinggi, modal dan teknologi. Namun perlu diingat modal dan teknologi hanya dapat diperoleh kalau suatu negara memiliki SDM bermutu tinggi. Melaksanakan industrialisasi dengan berhasil, negeri ini masih amat memerlukan SDM bermutu. Yang lebih penting lagi, jenis dan jenjang pendidikan yang diperlukan buat menggerakkan industrialisasi yang bertujuan meningkatkan nilai tambah dari sumber daya alam, tidak seluruhnya lulusan program S1. Bahkan sebaliknya, lebih banyak diperlukan lulusan program diploma. Dengan kata lain, untuk mentransformasikan 40,1 juta unit usaha kecil menjadi unit usaha menengah menjadi unit usaha besar, masih terbuka lebar peluang lulusan pendidikan diploma. Tapi ada syarat yang harus dipenuhi, program diploma yang dikembangkan adalah dalam bidang-bidang profesi yang diperlukan oleh industri.

Program pendidikan diploma adalah program vokasional yang bertujuan untuk mencetak lulusan profesional yang siap terjun langsung di dunia kerja. Lulusan diploma merupakan angkatan kerja yang diharapkan mendukung kinerja dan keberhasilan seluruh sektor riil, baik sektor jasa maupun produksi, seperti keuangan, pangan, kesehatan dan obat-obatan,

infrastruktur, otomatis atau transportasi, agroindustri, pariwisata, juga sektor-sektor lain. Oleh karena itu, kemampuan, jenis kompetensi, dan ketersediaan lulusan program diploma dalam jumlah banyak sangat diperlukan, khususnya untuk negara yang sedang berkembang, seperti Indonesia, untuk berubah menjadi negara maju. Makin maju sebuah negara, maka makin membutuhkan banyak lulusan program diploma yang berkualitas dan dengan jenis kompetensi yang tepat. Sungguh tidak mudah menapaki masa depan dengan terjadinya perubahan sangat cepat dalam lapangan kerja dan ketidakpastian tinggi. Saat ini berbagai jenis pekerjaan menuntut persyaratan kompetensi yang sifatnya kompetitif dan tidak lagi dibatasi oleh daerah fisik, oleh negara maupun pemerintahan suatu negara.

Rektor Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta Pratikno[7] menyebut, permintaan pasar tenaga kerja di Indonesia pada tahun 2013 mencapai 113 juta orang sementara ketersediaan sumber daya manusia (SDM) terampil yang tersedia masih berada pada angka 104 juta orang. Idealnya, minimal dua persen dari angkatan kerja adalah wirausahawan. Minimal 4,4 juta penduduk Indonesia menjadi pengusaha, namun saat ini baru memiliki 0,18 persen pengusaha atau sekitar 400 ribu orang saja. Singapura jumlah wirausahawan mencapai tujuh persen. Amerika Serikat yang memiliki jumlah wirausahawan mencapai 11,5 persen dari total angkatan kerja. Seiring dengan perkembangan ekonomi dunia, kompetisi untuk masuk di pasar kerja juga kian ketat. Di samping itu juga diperlukan tenaga-tenaga terampil untuk bisa mengisi dan membuka lapangan kerja baru. Beberapa negara yang terus mengembangkan diri di pasar kerja seperti Australia, Korea, China, Selandia Baru dan India. Negara-negara tersebut telah masuk di pasar kerja tingkat ASEAN termasuk di Indonesia. Kalau kita tidak siapkan SDM yang terampil dan kompeten ini menjadi ancaman. Lihat saja saat ini, para manajer perusahaan-perusahaan yang berasal dari negara asing.

Melihat kondisi itu, sangat di perlukan ada keseriusan dan sinergi antara perguruan tinggi, dunia industri dan pemerintah dalam mengembangkan pendidikan vokasi di Indonesia. Pengembangan yang dilakukan salah satunya dengan mendesain kurikulum yang fleksibel dan membuka ruang bagi dunia industri untuk berperan. Belum ada link and match antara institusi pendidikan dengan dunia industri, khususnya di bidang ketenaga-kerjaan. Hal itu merupakan pemborosan yang merugikan negara. Masih ada inefisiensi di dalam rekrutmen tenaga kerja di Indonesia. Sebagian besar rekrutmen (terutama yang dilakukan oleh pihak ketiga) belum secara sungguh-sungguh memberikan jaminan kompetensi tenaga kerja yang direkrut kepada industri, sehingga industri pemakai masih harus melakukan pelatihan dan pemagangan. Antara Depdikbud dan Depnakertrans belum benar-benar memiliki kesesuaian langkah, khususnya dalam penyiapan tenaga kerja terampil.

Menurut Pratikno [7], seiring diberlakukannya pasar bebas antar negara, akan masuk ke Indonesia tenaga kerja asing dari luar negeri khususnya China dalam jumlah yang cukup banyak. Ironisnya, tenaga kerja asing tersebut bukan dari tingkatan sarjana, magister, atau doktor, namun tenaga terampil di level sekolah menengah dan diploma. Hal ini memerlukan strategi penangkalan yang sistematis dan komprehensif. Sinergi baik antara pemerintah, dunia pendidikan dan industri dalam kolaborasi yang benar-benar terpadu.

Hingga saat ini permasalahan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) masih saja di jumpai di lapangan. Gap antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi tentang upaya penyelarasan aplikasi KKNI dengan pihak industri atau user masih belum terjembatani dengan baik. Sehingga konsep dan desain yang dikembangkan Kemendikbud bersama institusi pendidikan tinggi seperti universitas, sekolah vokasi maupun politeknik masih terkesan berjalan sendiri-sendiri tanpa respon konkret dari pihak industri. Misalnya saja, KKNI jelas menyatakan tentang kesetaraan antara pendidikan vokasi dan akademik. Sayangnya penyerapan lulusan DIV yang merupakan S1 Terapan belum sepenuhnya disiapkan secara konkrit oleh industri dan instansi pemerintah yang berkompeten. Kondisi tersebut terjadi karena sistem kepegawaian yang masih belum dapat membedakan dengan jelas antara lulusan DIV dengan S1 pada umumnya. Padahal terlihat jelas perbedaan bahwa lulusan DIV menyelesaikan pendidikan dengan komponen praktek sebanyak 60 persen dan teori 40 persen. Sedangkan pendidikan S1, 90 persen pembelajaran didominasi teori. Meskipun setara dalam KKNI, antara lulusan DIV dan S1, namun sistem pendidikan tidak didesain untuk bekerja dalam kompetensi yang sama. Dalam skema pengembangan karir seharusnya terlihat dengan jelas, dimana pada jalur pendidikan berbasis akademik memiliki potensi yang cukup kuat dalam bidang Riset And Development (R&D), sedangkan pendidikan yang berbasis vokasi memiliki keunggulan dalam mempersiapkan dan menghasilkan produk dari hasil R&D.

Persoalan lain seperti Kemenakertrans yang hingga kini masih berkuat dengan segala permasalahan TKI dan TKW. Padahal terdapat institusi pendidikan vokasi setingkat SMK, Sekolah Vokasi, akademi komunitas dan Politeknik yang seharusnya bisa dilibatkan dalam menyiapkan TKI yang berkualitas serta bermartabat.

Globalisasi menuntut perguruan tinggi untuk mulai memikirkan relevansi, kualitas, dan tata kelola guna menjaga eksistensi institusi dalam dunia yang semakin dinamis. Derasnya arus globalisasi menghadapkan pendidikan tinggi di Indonesia pada tantangan yang semakin berat. Perguruan tinggi dituntut mampu menyediakan sumber daya manusia yang berkualitas, infrastruktur, dan sistem pendanaan dalam mendukung operasionalisasi kegiatan. Penguatan pendidikan tinggi vokasi perlu perencanaan yang matang dengan adanya peta kebutuhan tenaga kerja di masa mendatang. Dengan acuan ini, pembukaan program studi di pendidikan tinggi vokasi ataupun akademik tidak sekadar mengikuti tren musiman.

TANTANGAN PENDIDIKAN VOKASI

Terdapat kesalahan berfikir dalam melihat bentuk layanan pendidikan di perguruan tinggi. Banyak masyarakat yang melihat bahwa kuliah haruslah berakhir dengan gelar sarjana. Padahal perguruan tinggi mengemban tugas menyelenggarakan pendidikan akademis (sarjana), vokasi (diploma), dan juga profesi (spesialis). Hingga saat ini pendidikan vokasional masih belum dipahami sebagai kebutuhan bangsa Indonesia. Masyarakat belum begitu menyadari akan peluang yang disediakan oleh

pendidikan diploma. Hal ini bisa dilihat dari masih banyaknya lulusan sekolah menengah kejuruan (SMK) yang memilih untuk melanjutkan studi ke jenjang sarjana.

Di kancah internasional, program vokasi menjadi andalan berbagai bangsa untuk membangun keberhasilan sistem kerja berbasis ketrampilan. Program pendidikan vokasi yang menghasilkan sumber daya siap pakai, menjadi senjata ampuh untuk menghadapi persaingan global. Untuk itu, kebutuhan terhadap lulusan pendidikan vokasional akan terus meningkat. Karena lulusan dari pendidikan vokasional sudah ditunggu masyarakat, terutama dunia industri. Pertumbuhan ekonomi dan perluasan industri tidak membutuhkan sertifikat dan gelar. Namun yang lebih utama adalah kebutuhan keterampilan berbasis pemahaman keilmuan yang dibutuhkan dunia industri, baik manufaktur maupun non-manufaktur. Bahkan sejak 2009, pemerintah menargetkan rasio SMK dibanding SMA 2:1. Artinya, jumlah ideal SMK dua kali lipat jumlah SMA. Upaya mendorong pengembangan pendidikan di SMK ini membawa konsekuensi pada pengembangan pendidikan vokasional atau ilmu terapan di tingkat pendidikan tinggi.

REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI

Sebagian besar masyarakat kita sampai saat ini masih asing dengan istilah pendidikan vokasi. Hal tersebut wajar karena kata vokasi belum dikenal secara luas di masyarakat, bahkan menurut Munir [6] dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang saat ini digunakan sebagai referensi perbendaharaan kata dan istilah oleh sebagian besar masyarakat, kata vokasi juga tidak kita temukan. Kata vokasi dewasa ini sering dikaitkan dengan kata pendidikan, sehingga muncul istilah pendidikan vokasi. Standar nasional pendidikan vokasi dikembangkan berdasarkan standar kompetensi nasional dan/atau internasional. Kurikulum pendidikan vokasi merupakan rencana dan pengaturan pendidikan yang terdiri atas standar kompetensi, standar materi, indikator pencapaian, strategi pengajaran, cara penilaian dan pedoman lainnya yang relevan untuk mencapai kompetensi pendidikan vokasi. Pendanaan pendidikan vokasi menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah, dunia kerja (dunia usaha/industri), dan masyarakat.

Dalam sistem pendidikan nasional kita harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaruan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan. Peran serta masyarakat dalam pendidikan vokasi meliputi peranserta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan. Dalam pelaksanaan kegiatan pendidikan vokasi dapat menjamin kerja sama dengan lembaga-lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri.

Pendidikan vokasi harus melibatkan dunia industri. Pendidikan vokasi tidak akan berhasil kalau tidak melibatkan industri yang ada di suatu wilayah. Kerja sama antara institusi pendidikan dan industri sangat menentukan keberhasilan pendidikan vokasional. Selain itu pemerintah daerah dan pusat serta organisasi profesi harus membantu standar-standar keahlian yang dibutuhkan dunia industri. Jadi keterlibatan dunia industri dalam pendidikan vokasi terutama dalam memberikan masukan (feed back) terhadap kompetensi dan standarisasi kemampuan seorang mahasiswa lulusan pendidikan vokasi sangatlah diharapkan. Pada kondisi yang harmonis antara penyelenggara pendidikan vokasi dan dunia industri dan masyarakat luas seyogyanya dapat melakukan suatu kolaborasi yang saling menguntungkan untuk menetapkan suatu sertifikasi profesi lulusan pendidikan vokasi yang diakui bersama. Dengan demikian, tuntutan masyarakat agar perguruan tinggi dalam hal ini pendidikan vokasi dapat memenuhi harapan masyarakat dan dunia industri akan tenaga kerja yang “siap pakai” dapat terwujud, dan perguruan tinggi tidak lagi dipandang sebagai menara gading.

REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE

Politeknik Negeri Lhokseumawe (PNL) merupakan salah satu Politeknik Negeri dari 43 Politeknik Negeri yang ada di Indonesia. Sejarah berdirinya PNL tidak dapat dipisahkan dari peran Universitas Syiah Kuala sebagai induk dan cikal bakal lahirnya PNL. PNL merupakan satu-satunya Politeknik Negeri yang berada di Provinsi Aceh. Gedung dan fasilitas PNL didirikan pada tahun 1985 dengan bantuan dari Bank Dunia XIII dan mulai menyelenggarakan pendidikan sejak tanggal 5 Oktober 1987, dengan nama Politeknik Universitas Syiah Kuala. PNL mengalami transformasi dari Politeknik Universitas Syiah Kuala menjadi Politeknik Negeri Lhokseumawe berdasarkan Surat Keputusan Mendikbud No. 100/O/1997 tanggal 9 Mei 1997.

Diawal berdirinya pada tahun 1987, PNL memiliki 3 Jurusan, yakni Teknik Sipil, Teknik Mesin dan Teknik Kimia. Pada tahun 1988 berdiri Jurusan Listrik yang kemudian berubah namanya menjadi Jurusan Teknik Elektro dengan dua program studi yaitu program studi Teknik Listrik dan Teknik Telekomunikasi. Program studi Teknik Elektronika yang merupakan bagian dari jurusan Teknik Elektro dibuka pada tahun 1992. Pada tahun 1998 juga berdiri Jurusan Tata Niaga dengan Program Studi Akuntansi, Keuangan dan Perbankan serta Administrasi Bisnis. Seiring dengan tuntutan dan perubahan paradigma pendidikan tinggi yang disertai kebutuhan pasar kerja, pada tahun 2015 prodi Teknik Informatika yang sebelumnya berada di bawah jurusan Teknik Elektro, berkembang menjadi jurusan Teknologi Informasi dan Komputer (TIK) dengan program studi Teknik Multimedia dan Jaringan. Sampai dengan tahun 2016, PNL memiliki 6 jurusan (Teknik Sipil, Teknik Mesin, Teknik

Kimia, Teknik Elektro, Tata Niaga dan Teknologi Informas dan Komputer) dengan 10 Prodi Diploma III dan 7 Prodi Diploma IV.

Sebagai institusi pendidikan tinggi vokasi, PNL harus dapat mengembangkan dirinya menjadi sebuah lembaga pendidikan tinggi yang profesional dalam penyelenggaraan dan berkualitas dalam menghasilkan produk akademiknya. Untuk itu, visi PNL adalah institusi pendidikan tinggi vokasi yang mandiri dan unggul di tingkat global pada tahun 2024. Adapun misi PNL adalah menyelenggarakan pendidikan vokasi secara mandiri dengan penguatan soft skill; mengembangkan peneltiandan pengabdian kepada masyarakat berorientasi teknologi inovatif serta aktif merespon isu global dalam upaya peningkatan kapasitas lembaga dan akses layanan dengan memperhatikan kearifan lokal.

Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi pada 2017 telah merevitalisasi 12 politeknik negeri sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi vokasional di Indonesia agar sesuai kebutuhan industry salah satunya di PNL. Tujuannya adalah agar PNL bisa meningkatkan pendidikan vokasi itu sesuai kebutuhan industri, jadi keterampilan tenaga kerja yang akan lulus atau kesiapan tenaga kerja dari politeknik ini adalah betul-betul yang akan digunakan dalam industri.

Politeknik Negeri Lhokseumawe telah mendapat kepercayaan dari Pemerintah Pusat sebagai salah satu Politeknik yang mendapat Program Revitalisasi Pendidikan Vokasi Se Indonesia, salah satunya untuk mendukung keberadaan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Arun Lhokseumawe. Terpilihnya Politeknik Negeri Lhokseumawe dalam Program Revitalisasi dikarenakan Politeknik Negeri Lhokseumawe merupakan kampus pertama di Indonesia yang melakukan penerapan Dual System yaitu (Sistem 3-2-1), sehingga saat ini telah menjadi barometer percontohan pendidikan vokasi di Indonesia. Dari Program Revitalisasi tersebut Politeknik Negeri Lhokseumawe akan melaksanakan Pembangunan Teaching Factory, Data Shearing Dosen dari industri (50% Dosen dari Politeknik Negeri Lhokseumawe dan 50% dari Industri) serta Retooling/Retraining Dosen Politeknik Negeri Lhokseumawe. Harapannya, kedepan semua lulusan Politeknik Negeri Lhokseumawe akan mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kompetensinya, dan industri akan mendapat pasokan tenaga kerja yang kompeten dari Politeknik Negeri Lhokseumawe.

PNL telah menerapkan pendidikan sesuai dengan kebutuhan pasar dan industri. Di sisi lain, situasi ini juga menggambarkan pasar saat ini dipenuhi tenaga kerja yang tidak memiliki kualifikasi khusus sehingga lowongan apa pun diserbu. Ini merupakan fenomena lama yang muncul di permukaan yang menunjukkan adanya permasalahan dalam sistem pendidikan kita. Tekanan tenaga kerja yang luar biasa hingga peluang dan harapan sekecil apa pun harus diambil mereka. Problem ini merupakan hubungan antara pendidikan dan dunia kerja. Fenomena ini juga merupakan output dunia pendidikan yang tidak bisa memenuhi kualifikasi dunia kerja. Komersialisasi pendidikan menjadikan pasar tenaga kerja tidak diisi lulusan yang berkualitas. Peran serta pemimpin formal maupun informal di daerah sangat penting dalam rangka memfasilitasi, serta memberikan dukungan maksimal dalam mengoptimalkan kinerja berbagai pihak dalam rangka membangun komunikasi dan kerjasama yang lebih aktif antar dunia usaha / industri dengan lembaga pendidikan vokasi. Hubungan dan koordinasi yang baik antar pemerintah, lembaga pendidikan vokasi dan dunia usaha/industri, akan dapat memberikan percepatan pertumbuhan dan peningkatan daya saing ekonomi yang pada akhirnya akan dapat mereduksi jumlah angka pengangguran di daerah.

KESIMPULAN

Indonesia saat ini berada pada fase peningkatan pertumbuhan ekonomi. Untuk dapat mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, sangat diperlukan adanya revitalisasi terhadap kualitas sumber daya manusia yang mampu untuk menghadapi tantangan tersebut. Melalui Undang Undang Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2012, Pemerintah telah mengakui betapa strategisnya sistem pendidikan vokasi untuk memperkuat sistem penguatan sumber daya manusia Indonesia di masa yang akan datang.

Untuk dapat mengimplementasikan amanah Undang Undang PT tersebut, sangat diperlukan adanya pembenahan terhadap pengelolaan sistem pendidikan vokasi melalui:

1. Pencitraan pendidikan vokasi, sebagai salah satu pendidikan unggulan untuk membangun masa depan yang lebih baik.
2. Revitalisasi pendidikan vokasi melalui pembenahan kurikulum dan implementasinya yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja..
3. Penguatan yang berkelanjutan antara pihak yang saling terkait (pendidikan vokasi, dunia usaha/industri, pemerintah dan stakeholder lainnya).
4. Lembaga pendidikan vokasi harus selalu menumbuhkan kepercayaan pasar kerja dengan cara menjaga mutu lulusan berkualitas dan memiliki kompetensi keahlian yang sesuai dengan kebutuhan pasar kerja.

REFERENSI

- [1] Republik Indonesia. 2012. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Armas Duta Jaya.
- [2] Republik Indonesia. 2012. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Tanggal 17 Januari 2012.
- [3] Mahathir.M. (1991). Malaysia: The Way Forward. Speech delivered at the Inaugural Meeting of the Malaysian Business Council, Kuala Lumpur.
- [4] Wan Seman. W.A. (2005). The New Sectors of Economic Growth: The Contributing Role of Technical and Vocational Education. Paper presented at National Technical & Vocational Education Conference, 11-12 January 2005, Crown Princess Hotel, Kuala Lumpur.
- [5] Camarao, F. (1996). Technology Education in Philippines. National Bookstore: Manila
- [6] Munir, M. (2009). Visi, Misi dan Tujuan program pendidikan vokasi UNIBRAW. Malang
- [7] Pratikno (2012). Sinergisitas Pendidikan Vokasi dan Industri untuk menjawab Kebutuhan Tenaga Kerja Terampil, Seminar Nasional 29 November 2012, Hotel Grand Aston, Jogjakarta.
- [8] Amiruddin Udin, Nurihah Mohamad Saleh, Mahfuzah Musban, and Norsyazreen Ramlan (2012): Industry Participation in Technical and Vocational Education and Training (TVET) in Malaysia.
- [9] Ahmad.O. (2003). The role of the National Vocational Training Council in the management of vocational training in Malaysia: A critical evaluation. Batu pahat: KuiTTHO.